

Evaluasi Prasyarat Keberhasilan Sistem Resi Gudang di Kabupaten Bantul

<https://doi.org/10.18196/agr.3250>

ABSTRACT

During 2011-2016, there was a decreasing trend of warehouse receipt sistem (WRS) transactions in Bantul regency and the participants of the WRS came from a small part of the districts. This condition indicated that there was an unfulfilled prerequisites for success of the WRS. This study aims to identify the role of stakeholders in the implementation of WRS and evaluate the prerequisites for success of WRS in Bantul regency. The research was conducted by in-depth interviews to stakeholders of the WRS. Data analysis was done using descriptive method. The result showed that stakeholders that have a big role in increasing warehouse receipts transactions were warehouse manager and department of trade. The increasing of production was a prerequisite that reinforces the existence of WRS

in Bantul regency. The success of the WRS were depends on two prerequisite of the commitment of local government and education and socialization to farmers. These findings indicate the need for the local governments to supports programs related to WRS and to intensify the dissemination of WRS to farmers in potential villages.

Keywords: *large harvest, prerequisite evaluation, warehouse receipt system (WRS), WRS transaction.*

INTISARI

Dalam kurun waktu 2011-2016, transaksi sistem resi gudang (SRG) di Kabupaten Bantul cenderung menurun dan peserta SRG berasal dari sebagian kecil kecamatan. Kondisi ini mengindikasikan ada prasyarat keberhasilan SRG yang belum dipenuhi. Penelitian ini bertujuan (i) mengidentifikasi peranan *stakeholder* dalam pelaksanaan SRG dan (ii) mengevaluasi prasyarat keberhasilan sistem resi gudang di Kabupaten Bantul. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan *stakeholder* SRG, selanjutnya data dianalisis secara deskriptif. Hasil analisis menunjukkan bahwa *stakeholder* yang mempunyai peranan yang besar dalam peningkatan transaksi resi gudang adalah pengelola gudang dan dinas perdagangan. Peningkatan produksi merupakan prasyarat yang menguatkan eksistensi SRG di Kabupaten Bantul. Keberhasilan SRG bergantung pada komitmen pemerintah daerah dan edukasi & *sosialisasi kepada pelaku usaha*. Temuan ini mengindikasikan perlunya pemerintah daerah mensinergikan program yang berkaitan dengan SRG dan mengintensifkan sosialisasi SRG kepada kelompok tani di beberapa desa yang potensial.

Kata kunci: panen raya, prasyarat keberhasilan, sistem resi gudang (SRG), transaksi SRG.

PENDAHULUAN

Sistem resi gudang (SRG) dilatarbelakangi oleh adanya kondisi panen raya komoditas pertanian yang berimplikasi pada turunnya harga komoditas tersebut.

Sistem ini hadir sebagai solusi tunda jual yang memfasilitasi petani dalam menyimpan hasil pertaniannya untuk menunggu harga komoditas kembali stabil atau naik. Melalui tunda jual tersebut, petani berkesempatan untuk mendapatkan selisih kenaikan harga jual yang selama ini dinikmati oleh para tengkulak/pedagang (Suryani, Erwidodo, & Anugrah, 2014). Selain itu, resi gudang dapat digunakan petani sebagai agunan untuk memperoleh kredit jangka pendek dari perbankan. Motivasi untuk mendapatkan fasilitas kredit tersebut merupakan motivasi utama penerapan resi gudang oleh petani padi di Cianjur (Masithoh, 2016). Oleh karena itu, SRG menjadi alternatif pembiayaan selain kredit ketahanan pangan, kredit usaha rakyat, dan kredit penguatan modal usaha kelompok (Rahayu, 2015).

Manfaat SRG telah dibuktikan secara empiris di beberapa negara. Di Afrika, menilai bahwa penerapan SRG dapat memberikan sejumlah keuntungan berupa fasilitasi perdagangan, meningkatkan efisiensi pemasaran produk pertanian, memudahkan akses kepada lembaga pembiayaan pedesaan, mitigasi risiko harga, dan meningkatkan efektivitas biaya manajemen cadangan pangan publik (Coulter & Onumah, 2002). Di Indonesia, petani peserta SRG di Warungkondang Cianjur memperoleh peningkatan harga gabah kering panen (GKP) antara Rp 400 – Rp 600/kg, sehingga pendapatannya meningkat sebesar Rp 2,2 juta per hektar sawah (Ashari, Ariningsih, Supriyatna, Adawiyah, & Suharyono, 2013). Demikian pula penerapan SRG di Turki, petani gandum dan petani jagung dapat meningkatkan profitnya berturut-turut sebesar 2-18% dan 12% (Zakiæ, Kovaëeviaë, Ivana, & Miroviaë, 2014).

Meskipun perkembangan SRG dalam tahun 2008-2010 cenderung positif, proporsi volume komoditas yang disimpan dibandingkan dengan hasil produksi nasional masih sangat kecil sekitar 0,003% (Ashari, 2011). Bahkan pada tahun 2015, terjadi penurunan nilai transaksi SRG yang cukup besar yaitu 30,32% (Tabel 1), padahal Kementerian Perdagangan menargetkan pertumbuhan sebesar 1,8%. Penurunan yang drastis ini disebabkan oleh dua hal, yaitu: i) harga gabah di tingkat petani pada tahun 2015 cukup tinggi, sehingga petani tidak melakukan tunda jual melalui SRG, dan ii) terhentinya operasionalisasi gudang SRG di beberapa daerah karena keterbatasan SDM pengelola gudang (Kementerian Perdagangan, 2016).

Beberapa permasalahan dalam implementasi SRG di beberapa wilayah di Indonesia ditemukan oleh beberapa studi sebelumnya. Peserta SRG didominasi oleh kalangan pedagang (Widiyani, 2014; Suryani, Erwidodo, & Anugrah, 2014) dan terbatasnya gudang yang memenuhi persyaratan (Suryani,

Erwidodo, & Anugrah, 2014; Sugiono 2014). Selain itu, ada keterbatasan pemahaman tentang SRG baik di tingkat petani maupun instansi pelaksana terkait (Anugrah, Erwidodo, & Suryani, 2015; Widiyani 2014). Permasalahan lainnya yaitu terbatasnya dukungan dan keterlibatan pemerintah daerah (Suryani, Erwidodo, & Anugrah, 2014).

TABEL 1. PERKEMBANGAN NILAI TRANSAKSI SRG DI INDONESIA TAHUN 2013-2015

Tahun	Nilai (Rp)	Pertumbuhan (%)
2013	108.948.556.100	
2014	116.416.391.200	+ 6,85
2015	81.135.514.490	-30,32

Sumber: Kementerian Perdagangan, 2016

Keberhasilan SRG pada sebuah wilayah pada hakikatnya ditentukan oleh beberapa prasyarat. Dengan memenuhi prasyarat tersebut, rencana dan target sebuah SRG dapat berlangsung dengan baik. Lima prasyarat keberhasilan SRG antara lain: i) adanya komitmen pemerintah daerah, ii) terintegrasinya kelembagaan pada sebuah wilayah, iii) edukasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha, iv) adanya peningkatan produksi, dan v) terdapat *buyer* (pasar lelang) untuk menjual komoditas yang disimpan (Balitbang Kementerian Perdagangan, 2014). Dengan demikian, keberhasilan SRG satu wilayah dengan wilayah lainnya dapat diperkirakan melalui identifikasi kelima faktor tersebut pada sebuah SRG.

TABEL 2. PERKEMBANGAN TRANSAKSI RESI GUDANG DI BANTUL TAHUN 2011-2016

Tahun	Volume Transaksi (Ton)	% terhadap Kapasitas Gudang	Daerah Asal Peserta
2011	86,75	6,20	Kec. Sanden, Bantul Pleret, Bantul
2012	207,77	14,84	Semarang, Kec. Pandak
2013	3,00	0,21	Kec. Pandak
2014	20,00	1,42	Kec. Pandak
2015	-	-	-
2016*	19,65	1,40	Kec. Pandak

Sumber: Pengelola Gudang SRG Bantul, 2016 (diolah)
Keterangan: *: data sementara sampai September 2016

Implementasi SRG di Kabupaten Bantul menghadapi permasalahan yang hampir sama dengan permasalahan umum yang dihadapi SRG di wilayah lain di Indonesia. Di samping terjadi kekosongan pengelola gudang pada tahun 2015, transaksi SRG di Kabupaten Bantul masih jauh di bawah kapasitas gudang (Tabel 2). Selama tahun 2011-2016, volume gabah yang ditransaksikan sekitar 5% dari kapasitas gudang (kapasitas maksimum gudang 1.500 ton). Selain itu, sebaran wilayah asal peserta SRG belum merepresentasikan

sentra produksi padi di Bantul. Bahkan dalam tiga tahun terakhir, transaksi SRG hanya melibatkan petani dari satu wilayah, yakni Kecamatan Pandak.

Dalam upaya memahami permasalahan implementasi SRG di Kabupaten Bantul, diperlukan identifikasi lembaga yang berperan dalam implementasi SRG dan evaluasi prasyarat keberhasilan yang seharusnya mendukung pelaksanaan SRG. Dengan demikian, strategi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan pelaksanaan SRG dapat direkomendasikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi kasus implementasi SRG di Kabupaten Bantul, yang transaksinya masih jauh di bawah kapasitas gudang dan cenderung mengalami penurunan. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan *stakeholder* SRG, yakni: (i) pengelola gudang (KUD Tani Harjo), (ii) Dinas Perdagangan, (iii) Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan, (iv) dan penyuluh pertanian. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari *stakeholder* SRG dan Badan Pusat Statistik Bantul berupa laporan pencatatan penerbitan resi gudang, dokumen perundang-undangan SRG, laporan *subbidang* pemberdayaan distribusi dan konsumsi tahun anggaran 2015, Bantul dalam Angka 2013-2015.

Pendekatan prasyarat keberhasilan SRG merujuk pada publikasi ilmiah Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perdagangan tahun 2014. Prasyarat keberhasilan meliputi: (i) komitmen pemerintah daerah, (ii) kelembagaan yang terintegrasi pada suatu wilayah, (iii) edukasi dan sosialisasi kepada pelaku petani, (iv) peningkatan produksi padi, (v) keberadaan *buyer* atas komoditas yang disimpan. Setiap prasyarat keberhasilan dijelaskan sejumlah indikator (Tabel 3) yang menjadi panduan dalam melakukan wawancara mendalam, selanjutnya dianalisis secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

STAKEHOLDER PELAKSANAAN SISTEM RESI GUDANG DI KABUPATEN BANTUL

Stakeholder dalam pelaksanaan sistem resi gudang di Kabupaten Bantul terdiri dari: (i) pengelola gudang (KUD Tani Harjo), (ii) Dinas Perdagangan, (iii) Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan, (iv) Penyuluh Pertanian, dan (v) *stakeholder* lainnya (lembaga penilaian kesesuaian-Bulog dan lembaga perbankan-Bank BRI). Berikut peranan masing-masing lembaga dalam pelaksanaan SRG di Kabupaten Bantul.

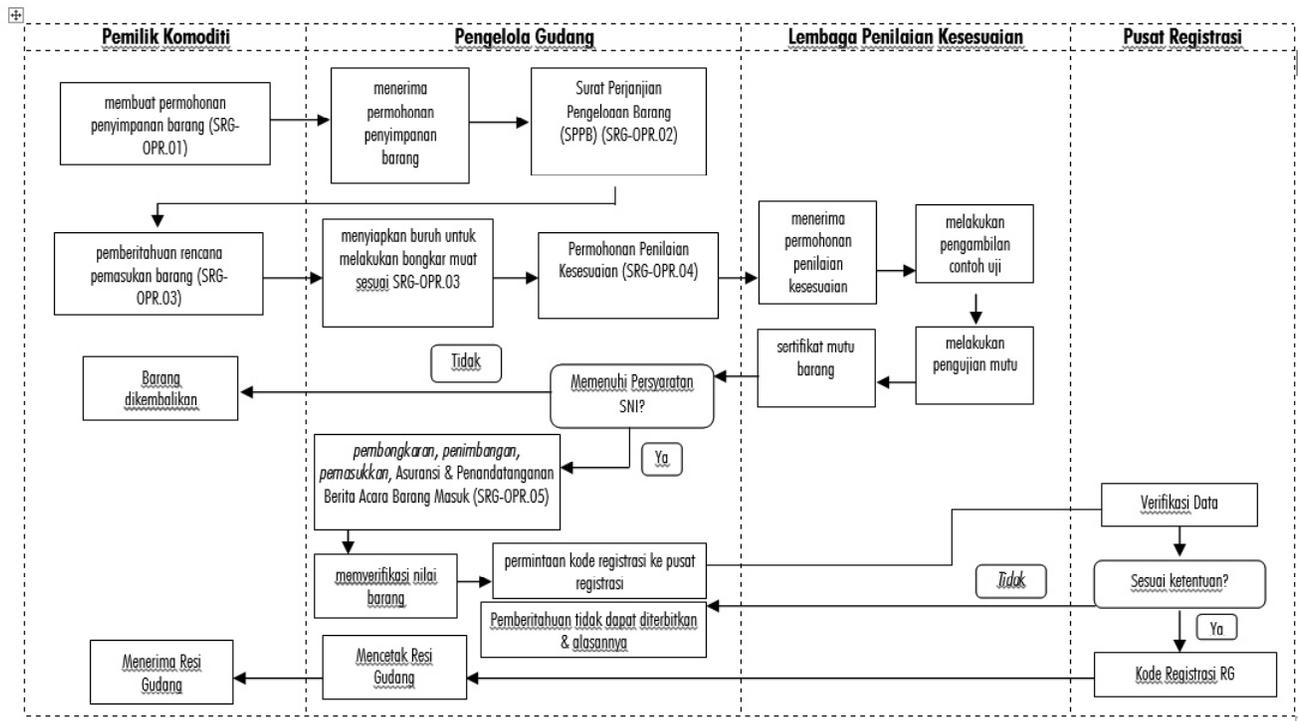
TABEL 3. INDIKATOR PRASYARAT KEBERHASILAN SISTEM RESI GUDANG

Prasyarat Keberhasilan	Indikator
Dukungan Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan Bupati untuk Pengembangan Sistem Resi Gudang 2. Dokumen <i>Roadmap</i> / Rencana Pengembangan SRG 3. Pencapaian Target 4. Alokasi APBD untuk Pelaksanaan SRG dan Subsidi 5. Kejelasan tugas pokok dan fungsi instansi yang terlibat dalam SRG 6. Koordinasi dan Sinergisitas antar instansi terkait
Keberadaan pasar lelang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan pasar lelang 2. Frekuensi pengadaan di pasar lelang 3. Keterlibatan masyarakat dalam pasar lelang
Edukasi dan Sosialisasi kepada Petani	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah SDM penyuluh untuk SRG 2. Frekuensi sosialisasi 3. Pemetaan sasaran tingkatan organisasi kelompok tani (utama, madya, lanjut) 4. <i>Tools</i> penyuluhan
Peningkatan Produksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan produksi padi per kecamatan 2. Perkembangan luas panen padi per kecamatan 3. Perkembangan produktivitas padi per kecamatan 4. Perkembangan harga gabah kering panen (gkp) per kecamatan
Kelembagaan yang Terintegrasi pada suatu wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jarak lokasi antar lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan SRG 2. Jarak lahan petani potensial dengan gudang

PENGELOLA GUDANG

Sejak 23 Desember 2016, gudang SRG di Kabupaten Bantul dikelola secara penuh oleh Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Harjo. Pengelola gudang berperan dalam penyimpanan dan pemeliharaan komoditas yang disimpan, penerbitan resi gudang, dan pemeliharaan aset gudang. Selain peran utama tersebut, pengelola gudang berperan melakukan promosi untuk meningkatkan transaksi resi gudang.

Dalam penerbitan resi gudang, pengelola gudang berkoordinasi dengan berbagai pihak (petani/kelompok tani, lembaga uji kesesuaian, lembaga penjamin, dan pusat registrasi) sebagaimana dirinci pada Gambar 1. Waktu yang diperlukan untuk seluruh alur penerbitan resi gudang sekitar 4-9 hari, tergantung kecepatan dari lembaga uji kesesuaian dan lembaga penjamin. Komunikasi antara pengelola gudang dan pusat registrasi didukung oleh Sistem Informasi Resi



GAMBAR 1. ALUR PENERBITAN RESI GUDANG

Gudang Pusat Registrasi (IS-WARE). Sistem informasi tersebut mencatat seluruh transaksi resi gudang meliputi pengalihan, pembebanan hak jaminan, dan penyelesaian transaksi.

Promosi dilakukan oleh pengelola gudang dengan membuat demplot padi pada luasan lahan 1 ha, bekerja sama dengan kelompok tani di Dusun Tegalayan, Desa Caturharjo (tahun 2016) dan pemerintah Desa Gilangharjo (tahun 2017). Produksi padi dari demplot tersebut direkomendasikan oleh pengelola gudang untuk diresigudangkan. Selain kegiatan promosi tersebut, pengelola gudang mempercayakan pada penyuluh pertanian atau sosialisasi yang diadakan oleh dinas perdagangan dalam mempromosikan resi gudang kepada petani.

TABEL 4. TRANSAKSI RESI GUDANG TAHUN 2016-2017

Tahun	Kuantitas (Ton)	Proporsi Peserta (%)		
		Petani	Poktan	Koperasi
2016	19,6	21,1	0	78,9
2017*	6,7	100,0	0	0

Ket: *angka sementara sampai Agustus 2017

Meskipun upaya promosi sudah dilakukan, capaian transaksi resi gudang pada tahun 2016-2017 masih rendah. Kapasitas maksimum gudang SRG sebanyak 1.500 ton dan ditargetkan terisi 500 ton per tahun, sedangkan transaksi

SRG tahun 2016-2017* belum mencapai 50 ton (Tabel 4). Dilihat dari proporsi peserta, belum ada kelompok tani yang terlibat dalam transaksi resi gudang. Selain itu, transaksi pada periode tersebut berasal dari kecamatan yang sama.

Untuk meningkatkan minat petani/kelompok tani terhadap SRG, pengelola gudang bekerja sama dengan pihak ketiga (badan usaha PT) dalam mengaktifkan mesin penggiling (*rice milling unit/RMU*) kapasitas 2-3 ton per jam. Selain RMU, gudang SRG menyediakan berbagai fasilitas pendukung antara lain: *dryer*, lantai jemur, truk pengangkut, dan lain-lain. Melalui pengaktifan RMU, petani/kelompok tani yang bertransaksi SRG mendapatkan beberapa manfaat. Pertama, jika gabah yang akan disimpan tidak memenuhi syarat uji kesesuaian, gabah dapat langsung digiling di gudang SRG. Kedua, jika gabah sudah selesai disimpan, petani tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi ke tempat penggilingan. Bagi pengelola gudang, pengaktifan RMU dapat menjadi unit bisnis dengan aktivitas: jasa penggilingan atau produksi beras kemasan (dengan membeli gabah petani).

Berdasarkan surat keputusan Kepala Bappebti Nomor 51/BAPPEBTI/Kep-SRG/SP/GD/12/2016, gudang SRG Bantul tergolong ke dalam klasifikasi A. Artinya, kondisi Gudang SRG Bantul lebih baik dari kondisi gudang yang disebutkan pada beberapa studi kasus SRG di wilayah lain. Sugiono (2014) menyebutkan bahwa gudang SRG di

Kecamatan Perak Kabupaten Jombang tidak sesuai dengan spesifikasi. Suryani, Erwidodo, & Anugrah (2014) juga menyebutkan bahwa kondisi pergudangan di Subang dan Indramayu secara umum kurang memadai. Gudang merupakan infrastruktur SRG, SRG dapat berfungsi memberikan jaminan kepada bank dan pembeli komoditas ketika gudang memiliki lisensi yang *reliable* (Jovièiæ, Jeremiæ, Miliæviæ, & Zeremski, 2014).

DINAS PERDAGANGAN

Lembaga negara yang berwenang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan pelaksanaan sistem resi gudang yaitu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Gudang yang akan dijadikan sebagai gudang SRG dan pengelola gudang SRG harus mendapatkan persetujuan dari Bappebti (dan sebelumnya direkomendasikan oleh Dinas Perdagangan setempat). Selanjutnya, Dinas Perdagangan menjadi perpanjangan tangan Bappebti dalam pengawasan kinerja pengelola gudang SRG.

Sejak SRG beroperasi pada tahun 2011, target Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul¹ adalah memunculkan pengelola gudang serta menjamin keberadaan *stakeholder* SRG & kelancaran transaksi resi gudang. Selama kurun waktu 2011-2014, calon pengelola gudang SRG Kabupaten Bantul yaitu KUD Tani Mulyo dengan didampingi PT Pertani dalam penerbitan resi gudangnya. Penunjukan KUD Tani Mulyo dijustifikasi oleh Keputusan Bupati Bantul Nomor 182 Tahun 2010. Namun, di akhir tahun 2014, KUD Tani Mulyo mundur untuk menjadi pengelola gudang SRG. Selanjutnya, Dinas Perdagangan mengadakan lelang pengelolaan gudang SRG dan KUD Tani Harjo terpilih sebagai calon pengelola gudang. KUD Tani Harjo disetujui oleh Bappebti sebagai pengelola gudang pada Desember 2016 melalui surat keputusan Kepala Bappebti Nomor 49/BAPPEBTI/Kep-SRG/SP/GD/12/2016. Terkait *stakeholder* yang mendukung kelancaran transaksi antara lain: Bulog Pajangan, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY.

Selain fungsi pengawasan kepada pengelola gudang SRG, Dinas Perdagangan juga mengadakan sosialisasi penyuluhan SRG kepada ketua/koordinator gabungan kelompok tani (Gapoktan), koperasi unit desa (KUD), dan atau pelaksana penyuluh lapang (PPL) se-Kabupaten Bantul. Sosialisasi tersebut biasanya dilakukan 1-2 kali setahun di gudang SRG atau di kantor Dinas Perdagangan. Materi sosialisasi meliputi: latar belakang SRG, manfaat SRG, proses mendapatkan resi gudang, syarat-syarat komoditi, dan subsidi SRG.

Berdasarkan peranan-peranan tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Bantul telah memberikan dukungan

dalam pengembangan SRG. Hal ini menunjukkan kondisi yang lebih baik jika dibandingkan studi kasus SRG di Kabupaten Subang (Suryani, Erwidodo, & Anugrah, 2014). Studi kasus tersebut menyebutkan bahwa peran pemerintah daerah baru sebatas sosialisasi dan kurang merespon usulan kelancaran SRG dari gapoktan atau pengelola gudang.

DINAS PERTANIAN & PENYULUH

Meskipun sistem resi gudang di bawah pengawasan Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian juga memiliki peranan penting, sebab peserta resi gudang adalah petani atau kelompok tani. Maka dari itu, Dinas Pertanian Kabupaten Bantul² termasuk dalam tim asistensi pengelolaan gudang sistem resi gudang yang dibentuk oleh Bupati Bantul melalui surat keputusan Nomor 58A tahun 2010. Dengan tergabungnya Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKP3) dalam Dinas Pertanian, terdapat tiga bidang³ dalam Dinas Pertanian yang terkait dengan eksistensi SRG: bidang tanaman pangan, bidang penyuluhan, dan bidang ketahanan pangan.

Pertama, bidang tanaman pangan saat ini sedang berusaha meningkatkan luas tambah tanam (LTT) untuk mencapai swasembada beras. Dengan adanya LTT, lahan dapat ditanami padi kembali satu minggu setelah panen. Peningkatan LTT didukung dengan perbaikan teknik budidaya, pengendalian OPT, termasuk perbaikan irigasi.

Kedua, bidang penyuluhan memegang peranan utama dalam penyampaian informasi kepada petani. Bidang ini setiap awal bulan mempertemukan koordinator Balai Penyuluhan Pertanian di setiap kecamatan dengan seluruh bidang yang ada di Dinas Pertanian, untuk penyamaan arus informasi ke petani. Khusus untuk sistem resi gudang, bidang penyuluhan mengalokasikan dua penyuluh untuk menjadi penyuluh resi gudang. Keduanya merupakan penyuluh yang aktif mengikuti pelatihan SRG yang diadakan oleh Bappebti tahun 2010, 2012, dan 2014.

Ketiga, bidang ketahanan pangan mempunyai keterkaitan dengan SRG karena komoditi SRG merupakan komoditas pangan: gabah, beras dan jagung. Bidang ini mempunyai peranan penting dalam pengawasan distribusi, konsumsi, dan stabilitas harga pangan. Sebagai upaya menstabilkan harga gabah di sentra-sentra produksi, bidang ketahanan pangan melaksanakan program lembaga distribusi pangan masyarakat (LDPM). Di Kabupaten Bantul, LDPM dikembangkan sejak tahun 2009, dua tahun sebelum SRG beroperasi. Meskipun akhir tahun 2015, program LDPM dimoratorium oleh pemerintah pusat, LDPM yang dibangun sejak tahun 2009 sampai 2015 masih eksis sampai saat ini.

STAKEHOLDER LAINNYA

Stakeholder lainnya yang mendukung kelancaran transaksi resi gudang antara lain: Bulog Pajangan untuk pengujian kesesuaian barang yang disimpan; Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk pengajuan kredit dengan agunan resi gudang; dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY untuk pelaksanaan pasar lelang.

Dalam pengujian gabah/beras, Bulog Pajangan menggunakan Standar Nasional Indonesia: SNI 01-0224-1987 untuk gabah (Tabel 5) dan SNI 01-6128-1999 untuk beras. Selama ini, sebagian besar gabah yang disimpan berhasil memenuhi ketentuan SNI. Namun, ketentuan SNI yang terkadang tidak dipenuhi pada komoditi gabah petani yaitu kadar air gabah lebih dari 14% dan gabah hampa berkisar 4-5%.

TABEL 5. STANDAR MUTU GABAH

Jenis Uji	Syarat Maksimal
Kadar Air	14%
Gabah Hampa	3%
Butir Rusak + Kuning	7%
Butir Mengapur + Gabah Muda	10%
Butir Merah	4%
Benda Asing	1%
Benda Varietas Lain	10%

Dalam pengajuan kredit dengan agunan SRG ke BRI, petani mendapatkan subsidi biaya bunga, sehingga hanya membayar sebesar 6% per tahun atau 0,5% per bulan. Besarnya kredit yang diberikan oleh Bank BRI sebesar 70% dari nilai resi gudang atau maksimum Rp 75 juta. Dalam menentukan nilai resi gudang, pihak BRI mengkonfirmasi pengelola gudang tentang besaran harga jual komoditi, karena resi gudang tidak mencantumkan nilai nominal komoditas yang disimpan. Harga jual komoditi biasanya ditentukan berdasarkan tingkat harga yang terjadi di pasar.

Sejak 2016, terdapat dua resi gudang yang diagunkan ke BRI. Hal ini sejalan dengan Listiani & Haryotejo (2013) bahwa resi gudang belum digunakan sebagai agunan oleh semua perbankan. Dari pengalaman pengajuan, petani menemukan dua kesulitan dalam mengakses kredit. Pertama, pihak bank mensyaratkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Kedua, pihak bank tidak akan memberikan kredit jika petani sedang menerima kredit bersubsidi lain seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Sementara itu, pasar lelang yang diadakan oleh BPD DIY sampai saat ini belum dimanfaatkan oleh peserta resi gudang. Hal ini disebabkan peserta resi gudang telah memperoleh pembeli atas komoditi yang disimpan tanpa harus menjual melalui pasar lelang. Pasar lelang dilaksanakan sebanyak enam kali dalam setahun di gedung pusat BPD DIY.

PRASYARAT KEBERHASILAN SISTEM RESI GUDANG

Dukungan pemerintah daerah. Dukungan pemerintah daerah dimanifestasikan dengan kinerja Dinas Perdagangan dan Dinas Pertanian dalam mendukung SRG. Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa Dinas Perdagangan berperan dalam memunculkan pengelola gudang dan menjamin kelancaran transaksi. Dinas Perdagangan juga mengadakan sosialisasi SRG kepada ketua/koordinator gapoktan dan KUD se-Kabupaten Bantul. Namun, sosialisasi tersebut belum ditindaklanjuti sampai tingkatan yang lebih rendah, yaitu kecamatan dan desa.

Selama 2012-2014, pemerintah daerah juga telah memberikan subsidi biaya penyimpanan di gudang SRG berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2012. Untuk komoditas gabah, besaran subsidi yang diberikan Rp 75/kg per 3 bulan. Artinya, subsidi pemerintah dapat menutupi seluruh biaya penyimpanan (Tabel 6), atau dengan kata lain petani/poktan/gapoktan/koperasi mendapatkan biaya penyimpanan secara gratis. Sejak 2016, subsidi biaya penyimpanan sudah tidak ada. Jika petani menyimpan gabah sebanyak 3 ton selama 3 bulan, biaya penyimpanannya sebesar Rp 345.000,-.

TABEL 6. BIAYA PENYIMPANAN KOMODITI DI GUDANG SRG*

Lama Penyimpanan	2011-2014				2016-2017			
	Gabah/Beras/ Jagung		Gabah	Beras	Jagung			
1 Bulan (Rp/kg)	45		85	90		90		
2 Bulan (Rp/kg)	60		100	105		105		
3 Bulan (Rp/kg)	75		115	120		120		

Keterangan: *belum termasuk biaya bongkar/muat dan biaya kantor

Fungsi peningkatan produksi padi telah dilakukan dengan baik oleh Dinas Pertanian, tetapi fungsi penyuluhan SRG belum dilakukan secara optimal. Dari 17 Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kabupaten Bantul, hanya dua BPP yang memiliki penyuluh yang telah mendapatkan pelatihan SRG: yaitu BPP Kecamatan Bantul dan BPP Kecamatan Sewon.

Selain itu, terdapat program Dinas Pertanian yang mempunyai latar belakang masalah yang sama dengan SRG yaitu Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM). LDPM bertujuan menstabilisasi harga padi, jagung, kedelai dan ubi kayu serta peningkatan cadangan masyarakat (BKP3 Kab. Bantul, 2015). Agar harga jual gabah tidak jatuh pada saat panen raya, LDPM menstabilisasi harga dengan membeli harga petani dengan harga pembelian pemerintah⁴ atau di atasnya. Untuk dapat membeli gabah petani, LDPM diberikan dana 80 juta rupiah dari APBN bantuan sosial. Sasaran LDPM adalah gapoktan di desa sentra produksi padi

(Tabel 7). Sampai tahun 2015, sebanyak 14 LDPM tersebar di 9 kecamatan sentra produksi padi di Kabupaten Bantul.

TABEL 7. KECAMATAN DAN DESA PENERIMA PROGRAM LDPM DI KABUPATEN BANTUL

No.	Kecamatan	Desa (Tahun Penumbuhan)	LDPM
1	Kretek	Donotirto (2009)	1
2	Bambanglipuro	Sidomulyo & Sumbermulyo (2009)	2
3	Pandak	Wijirejo (2009), Triharjo (2011)	2
4	Bantul	Bantul (2009)	1
5	Sewon	Pendowoharjo (2009), Bangunharjo (2011)	2
6	Jetis	Sumberagung (2011), Canden (2013), Patalan (2015)	3
7	Imogiri	Karangtalun (2012)	1
8	Piyungan	Srimilyo (2012)	1
9	Sedayu	Argomulyo (2013)	1
Jumlah			14

Sumber: BKP3 Kab. Bantul 2015

Sinergisitas SRG dan LDPM merupakan hal yang harus dipenuhi untuk keberhasilan SRG ke depan. Sebab, kedua program ini mempunyai latar belakang yang sama, yakni keduanya hadir untuk meningkatkan kesejahteraan petani ketika harga jual gabah jatuh. Ketika harga jual gabah jatuh saat panen raya, SRG menawarkan gudang untuk menunggu harga jual meningkat & resi gudang dapat dijadikan agunan, sedangkan LDPM menawarkan harga jual yang *fair* kepada petani secara langsung. Selain itu, sasaran LDPM yaitu sentra produksi padi yang merupakan wilayah berpeluang panen raya atau musim panen serentak.

Keberadaan buyer/pasar lelang. Prasyarat keberadaan pembeli atas komoditas yang disimpan sangat mudah terpenuhi tanpa adanya pasar lelang. Sebab, komoditas gabah atau beras merupakan pangan utama masyarakat Indonesia. Seluruh peserta SRG Kab. Bantul belum ada yang menjual resi gudangnya melalui pasar lelang yang diadakan oleh Bank BPD DIY.

Edukasi dan sosialisasi kepada petani. Sampai saat ini, pola sosialisasi yang digunakan oleh *stakeholder* SRG hanya ke ketua Gapoktan di tingkat kabupaten. Sosialisasi belum dilakukan di balai-balai penyuluhan di tingkat kecamatan atau desa. Hal ini berimplikasi pada informasi SRG yang belum sampai secara utuh kepada petani, baik secara individu maupun kelompok tani. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran untuk sosialisasi yang lebih intensif ke kecamatan atau desa potensial.

Kondisi penguasaan lahan yang sempit secara individu, mengharuskan pola sosialisasi dan tindak lanjut yang intens kepada kelompok tani. Bahkan, pengelompokan organisasi petani (utama, madya, lanjut) belum dijadikan pertimbangan yang penting dalam perumusan strategi sosialisasi. Selain itu, jumlah SDM penyuluh untuk SRG masih sangat minim. Kondisi ini sejalan dengan studi kasus Widiyani (2014) yang menemukan minimnya sosialisasi SRG kepada petani. Hal inilah yang menyebabkan rendahnya pengetahuan petani terhadap SRG serta berimplikasi terhadap rendahnya pemanfaatan SRG oleh petani. Padahal, Wijaya (2016) menilai bahwa SRG masih menjadi alternatif strategi bagi petani dalam meningkatkan kesejahteraan petani.

Peningkatan produksi. SRG dapat berjalan dengan baik, jika produksi komoditas pada wilayah tertentu mengalami peningkatan. Peningkatan produksi yang sampai pada taraf berlebihan akan berimplikasi pada turunnya harga jual, sehingga SRG diperlukan sebagai sarana tunda jual.

Produksi padi pada tahun 2011-2016 terbagi menjadi dua periode, yaitu 2011-2013 yang dicirikan dengan produksi yang meningkat dan 2014-2016 yang produksi fluktuatif (Tabel 8). Selama 2011-2016, luas panen fluktuatif dan produktivitas cenderung menurun. Turunnya produktivitas disebabkan sebagian wilayah mengalami gagal panen.

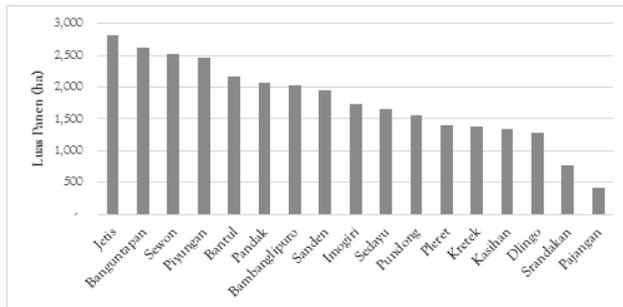
Wilayah produsen padi di Bantul hampir merata. Sentra produksi padi diindikasikan oleh kondisi irigasi yang baik sepanjang tahun, seperti Kecamatan Jetis, Banguntapan, Sewon, Piyungan, Bantul, Pandak, Bambanglipuro, dan lain-lain (Gambar 2). Wilayah-wilayah yang mempunyai topografi pegunungan seperti Pajangan dan Dlingo umumnya hanya

TABEL 8. LUAS PANEN, PRODUKTIVITAS, DAN PRODUKSI KOMODITAS PADI TAHUN 2011-2016

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Luas Panen (ha)	30.699	30.205	32.692	30.190	29.642	30.009
Produktiv. (ku/ha)	64,50	67,99	64,04	63,88	67,18	60,18
Produksi (ton)	198.004	205.355	209.364	192.846	199.141	180.593

Sumber: Bantul dalam Angka 2013, 2014, 2015

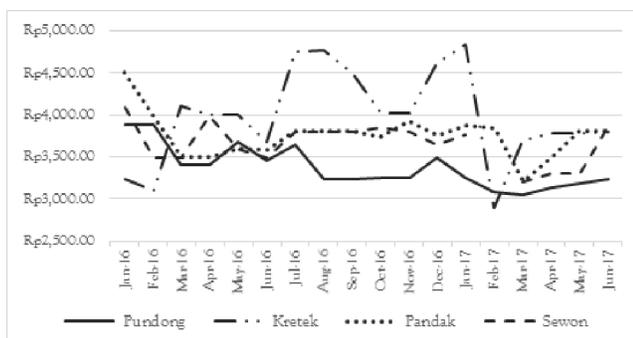
panen padi satu kali setahun. Ditinjau dari keikutsertaannya di SRG, kecamatan-kecamatan sentra belum memanfaatkan SRG. Dari data transaksi SRG di latar belakang, hanya Kecamatan Pandak yang memberikan kontribusi peserta sejak 2 tahun terakhir.



GAMBAR 2. GRAFIK LUAS PANEN PER KECAMATAN DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2014

Di sisi lain, perkembangan harga gabah (gabah kering panen/GKP) di setiap kecamatan menunjukkan tren yang hampir sama: musiman (Gambar 3). Harga GKP cenderung menurun sampai ke harga kurang dari Rp 3.500/kg pada bulan Januari, Februari, Maret dan April, lalu setelah itu mulai meningkat pada bulan-bulan setelahnya. Pada ketiga bulan tersebut, terjadi panen bersamaan sebab sentra hortikultura seperti Kecamatan Sanden, Srandakan dan Kretek menanam komoditas padi pada musim hujan. Turunnya harga pada empat bulan tersebut hampir terjadi di sebagian besar kecamatan. Bahkan, rendahnya harga jual GKP terjadi hampir sepanjang tahun di Kecamatan Pundong, Pleret dan Pajangan.

Kondisi jatuhnya harga jual gabah menguatkan bahwa SRG masih relevan sebagai sarana tunda jual di Kabupaten Bantul. Hal ini sejalan dengan hasil kajian yang dikemukakan Ashari (2010).



GAMBAR 3. GRAFIK PERKEMBANGAN HARGA GKP PER KECAMATAN DI KABUPATEN BANTUL JANUARI 2016-JUNI 2017

Kelembagaan yang terintegrasi. Prasyarat ini belum menjadi hambatan penting dalam pelaksanaan SRG di Kabupaten Bantul, karena beberapa alasan. Pertama, komunikasi dan koordinasi pengelola gudang dengan lembaga penilai kesesuaian dan perbankan dimudahkan dengan berbagai media IT, seperti *e-mail* dan *whatsapp*. Kedua, setiap jenis transaksi SRG menggunakan aplikasi IS-WARE, sehingga jarak gudang SRG dengan Pusat Registrasi bukan masalah. Ketiga, pengelola gudang SRG menyediakan jasa transportasi yang relatif terjangkau untuk petani dari sentra produksi.

Lokasi gudang yang berlokasi di Jalan Bantul memang relatif jauh dari sentra produksi seperti Kecamatan Jetis, Piyungan, Banguntapan, dan Imogiri. Namun, membangun ulang gudang SRG yang lebih dekat dengan sentra-sentra produksi tersebut bukan solusi tepat saat ini. Terlebih lagi, kondisi transaksi SRG yang saat ini masih rendah, padahal gudang SRG saat ini dekat dengan Kecamatan Sewon dan Bantul yang juga sentra produksi padi.

KESIMPULAN

Lembaga yang mempunyai peranan besar dalam peningkatan transaksi resi gudang adalah Pengelola Gudang dan Dinas Perdagangan, sedangkan lembaga lainnya belum proaktif dalam pengembangan SRG. Dari kelima prasyarat, "peningkatan produksi" merupakan prasyarat yang menguatkan eksistensi SRG di Kabupaten Bantul, sebab masih terjadi panen raya yang berimplikasi jatuhnya harga gabah (sekitar Bulan Januari-April). Di sisi lain, keberhasilan SRG ke depan bergantung pada prasyarat "komitmen pemerintah daerah" dan prasyarat "edukasi & sosialisasi kepada pelaku usaha". Temuan ini mengindikasikan perlunya pemerintah daerah untuk mensinergikan program-program yang berkaitan dengan SRG dan mengintensifkan sosialisasi SRG kepada kelompok tani di desa-desa yang potensial.

UCAPAN TERIMA KASIH

Studi ini merupakan bagian dari Hibah Penelitian Dosen Muda LP3M UMY yang berjudul Eksplorasi Sistem Resi Gudang Kabupaten Bantul Tahun 2016-2017.

CATATAN AKHIR

- 1 Sebelum tahun 2017, Dinas Perdagangan tergabung dalam Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
- 2 Sebelum tahun 2017 bernama Dinas Pertanian dan Kehutanan, setelah tahun 2017 bernama Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
- 3 Penulisan secara lengkap: Bid. Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; Bid. Sarana Prasarana dan Penyuluhan.

- ⁴ HPP mengikuti Instruksi Presiden Tahun 2015: GKP Rp3.700; GKG Rp4.600; Beras Rp7.300.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah, I.S., Erwidodo, & Suryani, E. (2014). Sistem resi gudang dalam perspektif kelembagaan pengelola dan pengguna di Kabupaten Subang: studi kasus KSU Annisa. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 13(1), 55-73.
- Ashari. (2010). *Posppek Sistem Resi Gudang (SRG) sebagai Alternatif Pembiayaan Sektor Pertanian* (ICASEPS WORKING PAPER No. 102). Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.
- . (2011). Potensi dan Kendala Sistem Resi Gudang (SRG) untuk Mendukung Pembiayaan Usaha Pertanian di Indonesia. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 29(2), 129-143.
- Ashari, Ariningsih, E., Supriyatna, Y., Adawiyah, C. R., & Suharyono, S. (2013). Kajian Efektivitas Sistem Resi Gudang dalam Stabilisasi Pendapatan Petani. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
- Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan. (2014). *Analisis Implementasi Sistem Resi Gudang Komoditi Lada*. Balitbang KP-Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan.
- Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKP3) Kab. Bantul. (2015). *Laporan Distribusi, Konsumsi, dan Stabilitas Harga Pangan Kabupaten Bantul 2015*. Bantul.
- Badan Pusat Statistik Kab. Bantul. (2014). *Bantul Dalam Angka 2013*. Bantul.
- . (2015). *Bantul Dalam Angka 2014*. Bantul.
- . (2016). *Bantul Dalam Angka 2015*. Bantul.
- Coulter, J., & Onumah, G. (2002). The Role of Warehouse Receipt Systems in Enhanced Commodity Marketing and Rural Livelihoods in Africa. *Food Policy*, 27(2002), 319-337.
- Jovievæ, D., Jeremivæ, L., Miliæevivæ, L., & Zeremski, A. (2014). Warehouse Receipt Functioning to Reduce Market Risk. *Economics of Agriculture*, 61(2), 347-365.
- Kementerian Perdagangan. (2016). *Laporan Kinerja Kementerian Perdagangan Tahun 2015*. Jakarta. Retrieved from <http://www.kemendag.go.id/id/about-us/strategic-planning>
- Listiani, N., & Haryotejo, B. (2013). Implementasi Sistem Resi Gudang pada Komoditi Jagung: Studi Kasus di Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 7(2), 193-212.
- Masithoh, D. (2016). *Biaya Transaksi Sistem Resi Gudang Gabah*. Institut Pertanian Bogor. Retrieved from <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/81706>
- Rahayu, L. (2015). Aksesibilitas Petani Bawang Merah terhadap Lembaga Keuangan Mikro sebagai Sumber Pembiayaan. *AGRARIS: Journal of Agribusiness and Rural Development Research*, 1 (1), 52-60.
- Sinha, P. & Mathur, K. (2014). *Efficient Indian Commodity Markets – Need for Comprehensive Warehousing System*. (MPRA Paper No. 59930). Munich.
- Sugiono (2014). *Pengaruh Sistem Resi Gudang terhadap Pendapatan Usahatani Padi di Kecamatan Perak Kabupaten Jombang*. Institut Pertanian Bogor.
- Suryani, E., Erwidodo, & Anugrah, I.S. (2014). Sistem Resi Gudang di Indonesia: Antara Harapan dan Kenyataan. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 12(1), 69-86.
- Widiyani, M. (2014). *Analisis Program Sistem Resi Gudang di Kabupaten Indramayu*. Institut Pertanian Bogor. Retrieved from <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/71086>
- Wijaya, O. (2016). Strategi Pengembangan Komoditas Pangan Unggulan Ketahanan Pangan Wilayah (Studi Kasus di Kabupaten Batang, Propinsi, Jawa Tengah). *AGRARIS: Journal of Agribusiness and Rural Development Research*, 3 (1), 48-56.
- Zakivæ, V., Kovæevivæ, V., Ivana, I., & Mirovivæ, V. (2014). Importance of Public Warehouse System for Financing Agribusiness Sector. *Economics of Agriculture*, 61(4), 929-943.